



2024

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Dinas Kominfo Jatim) Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Jatim dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Kominfo Jatim selama tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unit organisasi pendukung yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan fasilitas dan dukungan pemenuhan kebutuhan baik untuk Pimpinan serta seluruh Satuan Kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari kontribusi seluruh seluruh Satuan Kerja dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik.

LKjIP ini disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan relevan, serta telah melalui proses validasi dan verifikasi. Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKIP di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini. Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Jawa Timur yang maju dan berdaya saing di bidang komunikasi dan informatika. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan utamanya dapat dijadikan referensi dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendatang.

Surabaya, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.

NIP. 197508051998032002

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMINFO PROV. JATIM	3
1.3 ISU STRATEGIS	4
1.4 CASCADING KINERJA	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO PROV. JATIM	31
3.2 REALISASI ANGGARAN	75
3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	77
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
i. PERJANJIAN KINERJA.....	84
ii. CASCADING KINERJA.....	86
iii. POHON KINERJA.....	89

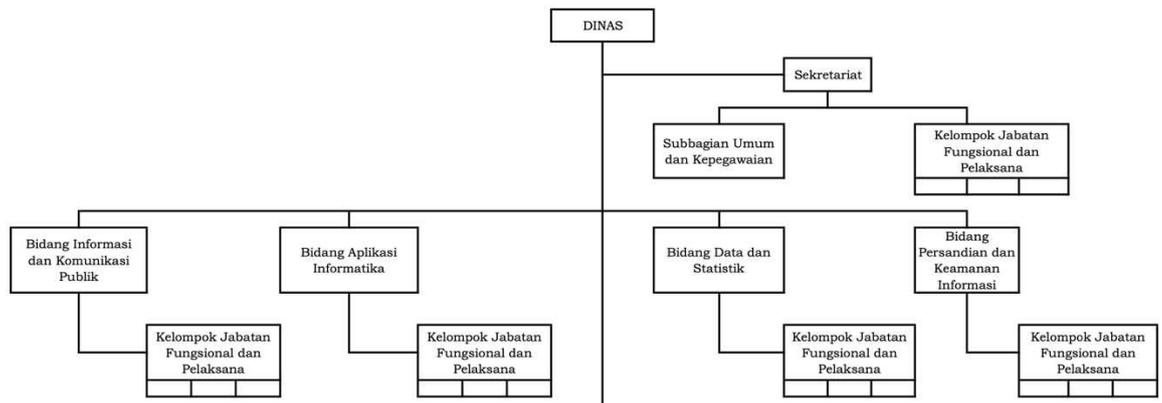
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini :

XIV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR



Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 bagian keempat belas pasal 148 tentang Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;
- c) pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.

Tugas pokok masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagaimana Pergub Jatim Nomor 72 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, kehumasan Pemerintah Provinsi;
3. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang aplikasi informatika;
4. Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi statistik ekonomi, statistik sosial, dan statistik infrastruktur dan kewilayahan;

5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang keamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas : ***“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian”***.

2. Fungsi

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi, data dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.

1.3 ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2024 merupakan capaian akhir pada dokumen perencanaan yang menentukan keberhasilan capaian indikator pada jangka menengah. Oleh karena itu capaian kinerja tahun 2024 menjadi penting karena sebagai baseline bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang 2025 – 2045 maupun jangka menengah 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan kinerja tahun 2024, beberapa isu strategis yang menjadi dasar pelaksanaan kinerja antara lain:

1. Isu strategis dibidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Publik

Masih adanya kesenjangan akses informasi di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil dan rural di Jawa Timur, yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan. Padahal dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah harus mengupayakan informasi publik yang inklusi dan menjangkau semua lapisan Masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan penguatan portal informasi digital pemerintah daerah untuk menyediakan akses

informasi yang relevan dan tepat waktu, serta Implementasi layanan komunikasi publik berbasis teknologi yang dapat menjangkau kelompok marjinal dan difabel.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui radio, website, media sosial dan Iklan layanan masyarakat. Sementara media luar ruang dalam bentuk Videotron, Baliho, Spanduk, Backdrop, dan Umbul-umbul. Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi oleh Jatim News Room (JNR) melalui website **koinfo.jatimprov.go.id** dan **jatimprov.go.id**.

Selain itu masyarakat juga dapat melakukan komunikasi dua arah kepada Pemerintah secara terintegrasi melalui Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online yang dapat diakses pada **sikipo.jatimprov.go.id**. Melalui website tersebut Masyarakat dapat melakukan permohonan informasi online, pengajuan keberatan informasi publik online dan menyampaikan aduan atau aspirasi kepada Pemerintah.

Beberapa kegiatan penyebarluasan informasi khususnya terkait pelayanan informasi antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dikelola melalui kanal aplikasi SP4N-LAPOR! Jatim (website, SMS, Android dan Media Sosial) serta kanal media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Twitter, Instagram, Youtube dan Facebook);
2. Diseminasi informasi dengan memfasilitasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jatim melalui Media Online dan Majalah Potensi yang bisa diakses melalui website: www.jatimprov.go.id dan koinfo.jatimprov.go.id;
3. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik

OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

4. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi *hoax* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
5. Penyebarluasan informasi yang positif pada masyarakat pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Jawa Timur

b. Integrasi Komunikasi Publik Berbasis Digital

Sistem komunikasi publik di beberapa perangkat daerah masih berjalan parsial, menyebabkan inkonsistensi penyampaian informasi, padahal beberapa perangkat daerah memiliki keterkaitan erat dan seharusnya melakukan komunikasi publik berdasarkan strategi komunikasi yang terintegrasi. Transformasi digital dalam komunikasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksinya perlu melakukan penyusunan strategi komunikasi yang terintegrasi sebagai benang merah bentuk koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu perlu dilakukan pembangunan platform komunikasi terintegrasi yang memungkinkan penyampaian informasi satu pintu, serta Pengembangan mekanisme manajemen krisis informasi, terutama untuk menyikapi disinformasi di ruang digital.

c. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menyebabkan

kerentanan terhadap hoaks, disinformasi, dan penyalahgunaan media sosial. Padahal literasi digital yang kuat akan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.

Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur perlu melakukan program edukasi literasi digital berbasis komunitas dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota dan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat), serta membangun kemitraan dengan media lokal dan platform digital untuk menyebarkan konten edukasi literasi digital yang relevan bagi masyarakat.

d. Pemanfaatan Teknologi AI untuk Komunikasi Publik

Pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) untuk analisis opini publik dan segmentasi audiens masih minim diterapkan, padahal AI dapat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan informasi masyarakat dan memberikan respons yang lebih personal dan efisien. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem chatbot berbasis AI untuk layanan informasi publik. Selain itu juga seharusnya dilakukan pemanfaatan big data dan AI untuk memantau tren isu publik dan menyusun strategi komunikasi yang adaptif.

Layanan chatbot whatsapp untuk memudahkan interaksi kepada Masyarakat dan pemanfaatan AI untuk mempercepat hasil analisis informasi pada layanan Klinik Hoaks diharapkan dapat meningkatkan layanan Klinik Hoaks kepada publik menjadi lebih nyaman dan cepat. Hal ini sangat penting karena perkembangan teknologi yang memungkinkan persebaran informasi berlangsung dengan sangat cepat, sehingga untuk menangkal persebaran hoaks dan disinformasi perlu dilakukan klarifikasi informasi yang lebih mudah dan cepat.

e. Keberlanjutan Media Komunikasi Lokal

Media lokal (seperti radio komunitas atau media cetak kecil) menghadapi tantangan finansial dan digitalisasi, padahal mereka merupakan penghubung informasi yang signifikan bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan media lokal melalui dukungan teknis dan kolaborasi dengan Pemerintah untuk diseminasi informasi pembangunan dan program prioritas daerah yang inklusif

f. Pengelolaan Krisis Informasi dan Kepercayaan Publik

Kecepatan informasi di era digital sering kali menyebabkan munculnya kabar simpang siur yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perlu ditingkatkan kapasitas manajemen komunikasi krisis untuk menangkal disinformasi dan hoaks, khususnya melalui pengembangan inovasi Klinik Hoaks yang memanfaatkan teknologi

2. Isu Strategis dibidang Aplikasi Informatika

a. Peningkatan Indeks SPBE dan Kematangan Digital Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE

Indeks SPBE di Jawa Timur masih menghadapi tantangan integrasi dan adopsi teknologi di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kominfo terus mendorong peningkatan indeks SPBE di Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8.5/2887/Bangda Tanggal 29 April 2024 Hal Penunjukkan Pemda Piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja Spbe Dan Konsolidasi Layanan Digital, Provinsi Jawa Timur Bersama Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya terpilih sebagai piloting / percontohan daerah terkait:

1. Portal Keterpaduan Layanan Digital, sebagai bentuk konsolidasi seluruh aplikasi SPBE kedalam 1 portal layanan digital Pemerintah Daerah yang juga merupakan transisi konsolidasi kedalam portal layanan nasional. Hal ini selaras arsitektur SPBE Nasional, yaitu untuk mewujudkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat
2. Evaluasi belanja TIK daerah untuk memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan hasil reviu dan Portal layanan publik berbasis digital.

Dalam rangka peningkatan indeks SPBE dan mendukung Jawa Timur sebagai piloting project, layanan publik berbasis elektronik dan penerapan SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo tetapi bersama dengan Perangkat Daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian masih terdapat perbedaan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan teknologi berbasis SPBE, sehingga transformasi digital memerlukan tata kelola sistem pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

b. Interoperabilitas Layanan Pemerintahan

Sebelumnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik masih belum terintegrasi pada satu portal layanan dengan satu sistem dan database yang terintegrasi. Kemudian banyak layanan publik digital belum memiliki desain yang user-friendly sehingga mengurangi tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, selain itu rendahnya integrasi antar-layanan publik menyebabkan ketidakpuasan pengguna.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi piloting project pembangunan portal layanan publik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi Dinas Kominfo untuk mengembangkan platform super-apps layanan pemerintahan yang menyatukan berbagai layanan dalam satu portal, yaitu MajaDigi.

Terdapat empat level atau tahapan integrasi layanan publik yang akan dikembangkan melalui portal MajaDigi, yaitu:

Level	Deskripsi	Jenis Integrasi	Kelebihan	Kelemahan
1. Dashboard	Hanya menampilkan layanan, tidak ada integrasi data.	Tidak ada koneksi antar-aplikasi (hanya tautan link aplikasi pada dashboard)	Mudah diterapkan, cepat.	Data terpisah, tidak ada interoperabilitas.
2. Saling Tertaut (SSO)	Login satu kali untuk banyak layanan, tetapi data masih terpisah.	Single Sign-On, tetapi database masih independen.	Nyaman bagi pengguna, tanpa login berulang.	Masih ada duplikasi data.
3. Berbagi Data (API)	Aplikasi bisa saling berbagi data secara otomatis, tetapi database masih terpisah.	API memungkinkan pertukaran data antar-sistem.	Sinkronisasi data otomatis, meningkatkan efisiensi.	Format data harus distandarisasi, masih ada batasan interoperabilitas.
4. Integrasi Penuh	Semua sistem berbagi satu database dan bekerja sebagai satu sistem.	Semua aplikasi dalam satu sistem dengan database terpusat.	Efisiensi tinggi, tanpa duplikasi data.	Kompleksitas dan biaya implementasi sangat tinggi.

Pada tahap awal pengembangan MajaDigi berada pada level 2, yaitu pelayanan publik yang terintegrasi secara dashboard dan Single-Sign-On untuk beberapa aplikasi. Data-data yang ada pada MajaDigi juga akan terintegrasi dengan sistem big data Pemprov Jatim yaitu Open Govt, sebagai dashboard eksekutif.

Layanan MajaDigi yang telah eksis pada tahun 2024 yaitu:

1. SSO dengan BKD Jatim, SSW Kota Surabaya, Smart Kampung Kab. Banyuwangi, TOSS Kab. Tuban
2. Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:
 - Layanan Bapenda : Pajak Kendaraan bermotor dan Nilai jual kendaraan bermotor
 - Layanan BKD : Rumah ASN
 - Layanan Disbudpar : Agenda Wisata
 - Layanan Diskominfo : Open Data, Klinik Hoaks
 - Layanan RS Dr. Soetomo : Sistem Informasi Pasien, Informasi Ketersediaan Kamar dan Layanan Ambulance
 - Layanan Dishub : Transjatim Ajaib
 - Layanan DPMPTSP : Point Jatim
 - Layanan Disnaker : Informasi Lowongan Kerja dan Informasi Pelatihan Kerja

Namun demikian pengembangan MajaDigi kedepannya menemui tantangan yang cukup besar dimana masih terbatasnya standar teknis pada masing-masing aplikasi layanan Pemerintahan dan protokol data untuk mendukung interoperabilitas. Padahal sebagaimana yang disampaikan Interoperabilitas antar-sistem penting untuk menciptakan ekosistem digital yang saling mendukung dan efisien, karena layanan Pemerintahan digital yang efisien dan inklusif adalah elemen penting dari SPBE

c. Peningkatan Infrastruktur Digital

Adanya Ketimpangan akses infrastruktur digital, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di Jawa Timur, dimana terdapat 893 titik blankspot yang terbagi pada 273 Kecamatan di Jawa Timur. Padahal Infrastruktur digital merupakan fondasi bagi keberhasilan implementasi layanan berbasis elektronik di pemerintahan yang memungkinkan masyarakat secara inklusi dapat mengakses internet dan menikmati layanan publik berbasis elektronik.

Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan penguatan konektivitas jaringan broadband di daerah pedesaan dan mengurangi titik blankspot di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun jaringan internet berkecepatan tinggi di area sektor publik dan meningkatkan penetrasi teknologi 5G.

d. Pemanfaatan Data Center

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah membangun Data Center bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejak dibangun hingga sekarang, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berupaya agar Data Center berstandar Nasional. Standar Data Center yang baik telah dirumuskan Badan Standar Nasional Indonesia antara lain standarisasi sistem keamanan, pemrosesan dan penyimpanan, koneksi internet dan bandwidth, sumber daya listrik dan lain-lain.

Mengacu pada standar SNI, Data Center Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan beberapa spesifikasi teknis pusat data antara lain : sistem kelistrikan, sistem pendinginan, sistem

kebakaran, sistem keamanan fisik dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang telah memenuhi standar ISO 27001 tahun 2022.

Manfaat Data Center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan *e-government* di Jawa Timur yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyediakan beberapa layanan penting diantaranya *Colocation*, *Hosting* dan *Virtual Private Server (VPS)*.

Pada tahun 2024 layanan pusat data yang diberikan antara lain:

1. Hosting Layanan fasilitasi aplikasi : 349 aplikasi
❖ Perangkat Daerah : 52
❖ Kabupaten / Kota : -

2. Colocation Layanan fasilitasi server : 100 server
❖ Perangkat Daerah : 23
❖ Kabupaten / Kota : 13

3. VPS (Virtual Private Server)
Layanan fasilitasi server virtual : 105 server virtual
❖ Perangkat Daerah : 18
❖ Kabupaten / Kota : 5

Peningkatan Kapasitas Data Center

Eksisting :	Penambahan :
✓ Storage operasional 66 TB terpakai 56 TB	✓ Storage ditambah 50 TB menjadi 116 TB
✓ Storage backup data (-)	✓ Storage backup data dan operasional 432 TB

e. Jaringan Intra Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Jaringan Intra Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya. Hingga pada tahun 2023, pendekatan koneksi

pada Jaringan Intra Pemerintah menggunakan jaringan backbone, dimana sejak dimulai pembangunannya pada tahun 2019 sebagaimana program prioritas Nawa Bhakti Satya, jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi setiap tahunnya selalu bertambah. Namun dikarenakan pembangunan jaringan backbone yang membutuhkan anggaran yang besar, sehingga hanya 15 Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan backbone. Selanjutnya pada tahun 2024 digunakan pendekatan koneksi Jaringan Intra Pemerintah menggunakan VPN (Virtual Private Network) yang lebih efisien. Pada tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah telah terhubung dalam jaringan intra pemerintah melalui jaringan backbone dan VPN, bahkan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga telah terkoneksi dalam jaringan Intra Pemerintah melalui VPN.

f. Pengembangan SDM Digital Pemerintahan

Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan formasi jabatan yang terbatas dan kesempatan sertifikasi pegawai yang kurang, sehingga kompetensi teknis dan literasi digital di kalangan aparatur masih kurang. Padahal SDM yang kompeten menjadi motor penggerak transformasi digital. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk melakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM. Selain itu Dinas Kominfo juga aktif bekerjasama dengan stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan industri teknologi seperti google dan AWS untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan talenta digital. Secara lebih spesifik, penganggaran terkait sertifikasi pegawai dalam hal digital juga terus ditingkatkan seperti sertifikasi pengelola SPBE dan sertifikasi sistem informasi LSP.

3. Isu Strategis dibidang Data Statistik

a. Implementasi Satu Data Jawa Timur 2024

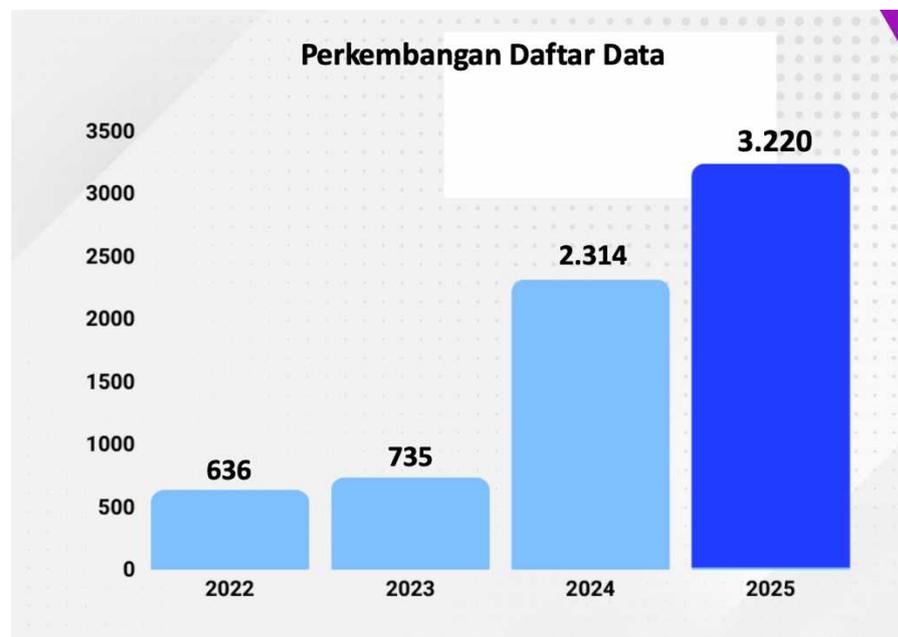
Belum optimalnya integrasi data antar-perangkat daerah menyebabkan duplikasi dan ketidaksesuaian data, terbatasnya data statistik sektoral yang tersedia real time, kemudian kurangnya validasi dan mekanisme verifikasi data dari perangkat daerah juga mengurangi kualitas data statistik sektoral, selain itu adanya perbedaan standar metadata dan format data antar Perangkat Daerah juga menghambat interoperabilitas. Beberapa hal tersebut mengakibatkan rendahnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy making)

Satu Data Jawa Timur bertujuan untuk menyelaraskan data sektoral guna mendukung efisiensi kebijakan dan pembangunan berbasis data. Untuk itu diperlukan beberapa hal antara lain:

4. Penguatan regulasi dan kebijakan daerah terkait standardisasi dan interoperabilitas data antar-instansi.
5. Pembangunan data warehouse dan data lake sebagai pusat integrasi dan analisis data pemerintah daerah.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui forum data daerah untuk memastikan keselarasan standar metadata dan kebijakan data terbuka.
7. Pemanfaatan teknologi big data analytics dan data mining untuk meningkatkan akurasi dan validitas data.
8. Penerapan sistem data governance yang jelas, termasuk mekanisme audit data secara berkala.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020 Tentang Satu Data Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai walidata bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan Metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data. Dalam rangka mengumpulkan data dari

produsen data, pada tahun 2020 dibangunlah warehouse Satu Data Jawa Timur yang merupakan media bagi pakai data yang dapat diakses dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Provinsi Jawa Timur. Portal Satu Data Jawa Timur dimanfaatkan oleh 41 Perangkat Daerah, 9 Biro dilingkungan Sekretariat Daerah dan 14 Rumah Sakit (UOBK). Dalam perkembangan Satu Data Jawa Timur, desk daftar data dilakukan pada Forum satu Data dan hasil daftar data ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, dimana jumlah daftar data terus meningkat dari tahun ke tahun.



b. Peningkatan Aksesibilitas dan Transparansi Data Publik

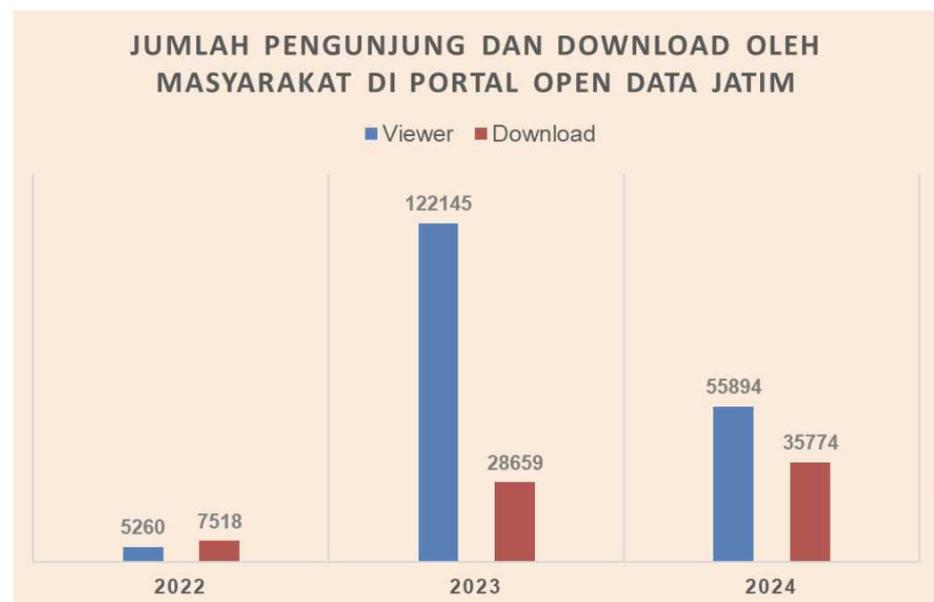
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap data sektoral yang dikelola pemerintah daerah, dimana juga terdapat kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan data yang dipublikasikan kepada masyarakat.. Padahal data yang terbuka dan mudah diakses memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengembangkan portal open data yang dapat diakses oleh masyarakat. Implementasi kebijakan keamanan data juga tetap mendukung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, karena data yang dipublikasikan bukanlah data yang bersifat rahasia atau dikecualikan dan telah mendapat persetujuan dari produsen data.

Open data Jawa Timur adalah Portal data terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi pakai data antar instansi maupun masyarakat. Jumlah Dataset terpublikasi antara lain:

- Portal SATA Jatim : 1.878
- Kab/Kota melalui CKAN : 57.828
- Total Dataset : 59.706

Jumlah pengunjung dan pengunduh data pada layanan open data Jawa Timur juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung website melonjak pada tahun 2023 dikarenakan publikasi optimal terkait open data Jawa Timur sebagai pengenalan portal data yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



Dengan jumlah pengunjung dan pengunduh data pada Open Data Jawa Timur yang terus meningkat, maka diperlukan

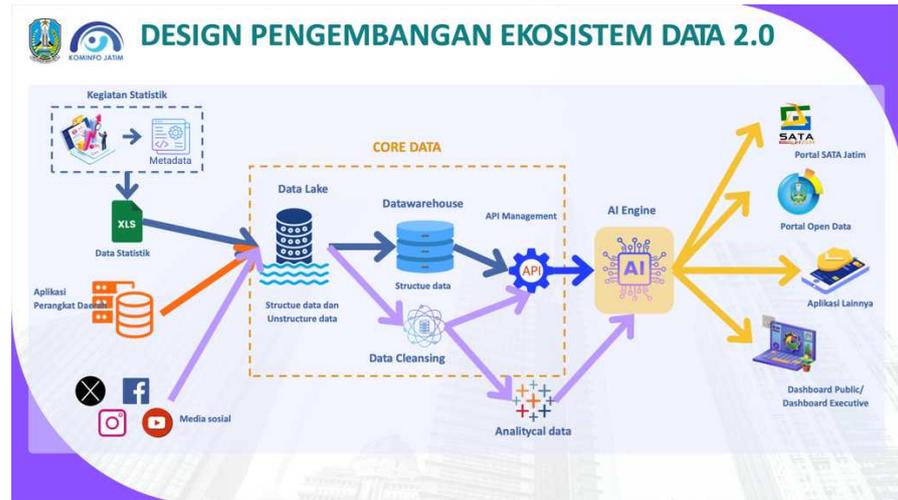
pengembangan portal yang lebih user friendly dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Untuk itu kedepannya akan dikembangkan pemanfaatan AI pada portal open data.



c. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam Statistik Daerah

Minimnya pemanfaatan teknologi AI dan machine learning dalam pengolahan data statistik sektoral Pemerintah Daerah serta keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam analitik data, sehingga dibutuhkan artificial intelligence dalam proses analisa data. Karena pemanfaatan Artificial Intelligence dan big data dapat meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data statistik dan menghasilkan insight yang lebih mendalam untuk kebijakan daerah.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berencana untuk mengembangkan ekosistem data yang memanfaatkan Artificial Intelligence untuk analitik data misalnya memprediksi tren ekonomi, sosial, dan lingkungan di Jawa Timur. Tidak hanya mempersiapkan sistem, tetapi SDM yang ada juga harus disiapkan untuk menggunakan sistem yang akan terbangun, sehingga penting untuk dilakukan pelatihan bagi aparatur pemerintahan di bidang data science dan analitik statistik berbasis AI.



d. Penguatan SDM dan Tata Kelola Data Statistik

Kurangnya tenaga ahli statistik dan analis data di lingkungan pemerintahan daerah serta terbatasnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya tata kelola data yang baik. Padahal dalam rangka mendukung Satu Data Jawa Timur, sangat dibutuhkan SDM yang memiliki keterampilan di bidang pengelolaan dan analisis data.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur berupaya untuk melakukan Program peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data statistik, termasuk pelatihan data analytics dan visualisasi data melalui sertifikasi data scientist. Selain itu juga perlu dilakukan penyusunan pedoman tata kelola data bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas dan keandalan data statistik sektoral di Jawa Timur

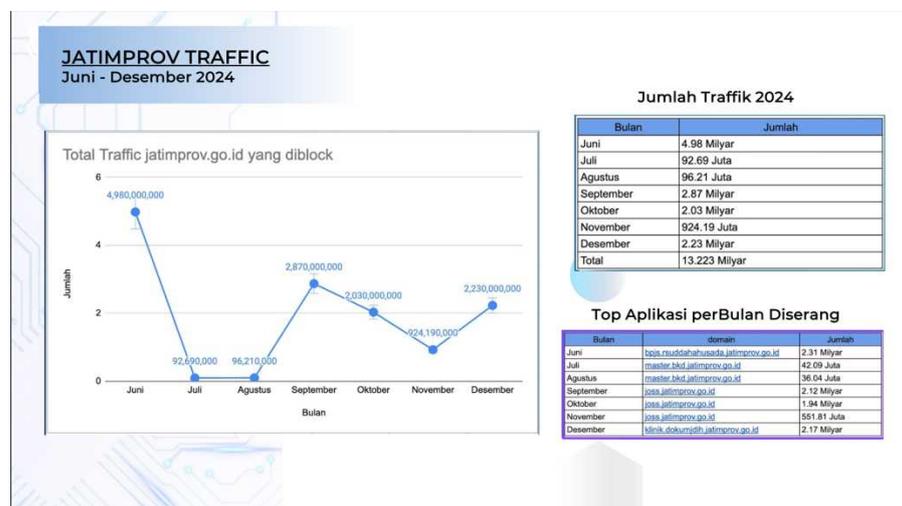
4. Isu Strategis dibidang Persandian dan Keamanan Informasi

a. Peningkatan Ketahanan Siber dalam Infrastruktur Digital Pemerintah

Ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin meningkat, seperti peretasan, ransomware, dan kebocoran data. Hal tersebut dikarenakan minimnya tingkat

kematangan keamanan informasi di sebagian besar Perangkat Daerah. Padahal dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik melalui SPBE, ketahanan siber menjadi elemen kunci dalam melindungi data pemerintah dan masyarakat. Dalam hal infratraktur digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki pengamanan berupa lisensi, firewall dan server backup data with self encryption protection. Dalam hal persandian dan keamanan informasi juga diperkuat dengan peralatan jammer dan pengamanan informasi mobile yang bisa digunakan lebih mudah.

Data penanganan insiden siber selama tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:



- b. Penguatan Kebijakan dan Standar Keamanan Informasi di Perangkat Daerah
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menginisiasi penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan manajemen keamanan informasi di Jawa Timur. Namun pada pelaksanaannya, kesadaran dari Perangkat Daerah tentang keamanan informasi masih perlu ditingkatkan. Karena seringkali insiden siber disebabkan oleh kerentanan sistem pada masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian juga perlu dilakukan audit berkala terhadap sistem keamanan informasi yang ada di masing-masing Perangkat Daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber Berbasis Persandian
Sistem keamanan data pemerintahan masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, selain itu persandian digital juga belum digunakan secara luas untuk mengamankan komunikasi dan transaksi pemerintahan. Padahal pemanfaatan teknologi persandian yang lebih canggih diperlukan untuk memastikan keamanan data dan informasi pemerintah.
Kedepannya perlu dilakukan penerapan public key infrastructure (PKI) untuk meningkatkan keamanan transaksi digital dan autentikasi identitas, serta pengembangan pusat operasi keamanan siber (Security Operations Center/SOC) di tingkat provinsi untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber secara real-time.
- e. Kesadaran dan Kapasitas SDM dalam Keamanan Informasi
Terbatasnya kesadaran aparatur pemerintah mengenai ancaman siber dan pentingnya keamanan informasi, serta

minimnya tenaga ahli di bidang keamanan siber di pemerintahan daerah. Untuk itu perlu dilakukan penguatan literasi keamanan siber bagi pegawai pemerintahan sangat penting untuk mencegah serangan siber akibat kelalaian manusia (human error).

Kedepannya perlu dilakukan program pelatihan berkala tentang keamanan informasi dan teknik mitigasi serangan siber bagi aparatur sipil negara bekerjasama dengan BSSN dan perguruan tinggi, untuk menciptakan tenaga ahli keamanan siber di Jawa Timur.

1.4 CASCADING KINERJA

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Visi, Misi Jawa Timur 2019-2024.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Jatim terkait erat dalam pencapaian sasaran ke-6.4 PJMD Jawa Timur 2019-2024 : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi, dengan indikator pencapaian sarannya yaitu "*Indeks SPBE*".

Berdasarkan sasaran RPJMD Jawa Timur 2019-2024 di atas, maka tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dapat dirumuskan sebagai berikut : "*Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik*"

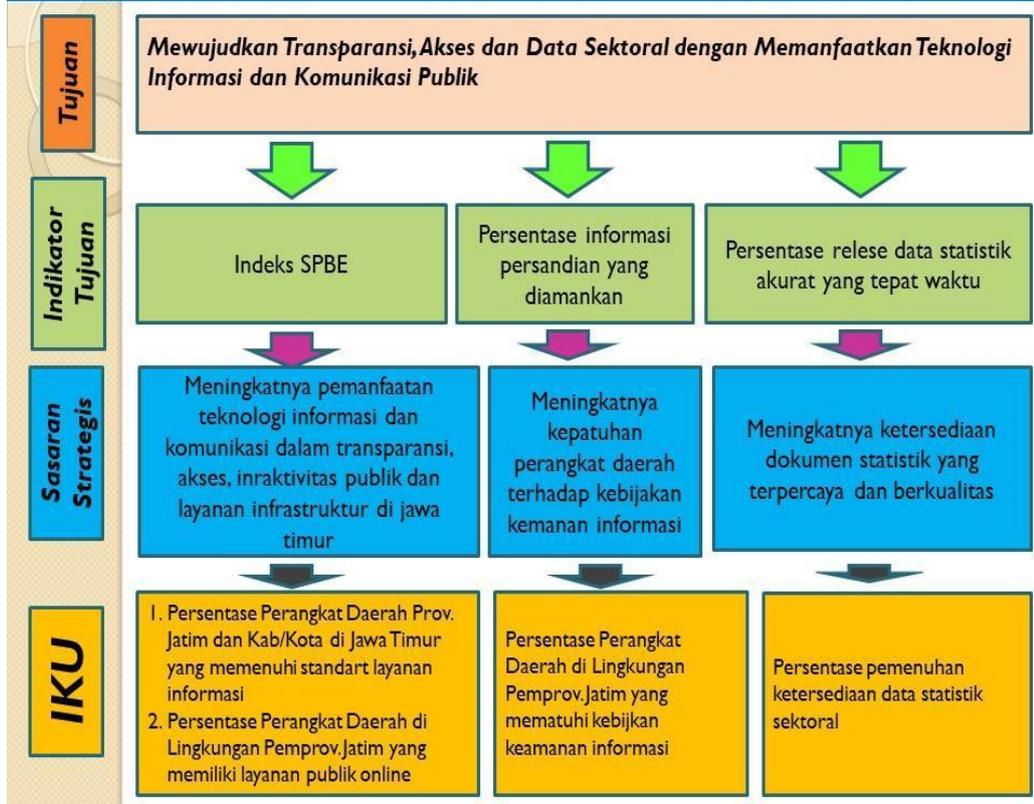
Pada dokumen perencanaan jangka menengah Jawa Timur (RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mendukung:

1. Misi ke-3 (tiga) RPJMD yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”.
2. Tujuan 6 RPJMD yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik”
3. Sasaran 6.4 RPJMD yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Cascading adalah proses manajemen kinerja organisasi dan bagaimana cara melakukannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



RENSTRA DINAS KOMINFO PROV. JATIM 2019-2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RINGKASAN RENSTRA.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2019 - 2024 telah mengakomodir dinamika pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 2019 - 2024. Renstra ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Dalam hal ini Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga mengalami perubahan pada tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dimaksud meliputi :

“Mewujudkan Transparansi Akses Data Sektoral dan Keamanan Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik”.

Indikator tujuan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu
3. Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Sedangkan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Dengan indikator :

- Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur;

Dengan indikator:

- Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur yang Memenuhi Standart Layanan Informasi
- Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas;

Dengan indikator:

- Persentase pemenuhan ketersediaan data statistika sektoral

4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi.

Dengan indikator:

- Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi.

Tabel 2.1
INDIKATOR TUJUAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024
1.	Mewujudkan Transparansi Akses Data Sektoral dan Keamanan Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	1. Indeks SPBE	4
		2. Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu	75 %
		3. Persentase Informasi yang Persandian dan Diamankan	55 %

2.2 RENJA PERIODE BERJALAN.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Tabel 2.2
INDIKATOR SASARAN

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1. Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70%
	2. Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%

3.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase ketersediaan data sektoral	pemenuhan statistik	70%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi		45%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pengesahan dari Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) sebagai penjabaran rencana strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang relevan. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan. Perjanjian Kinerja merupakan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun menggunakan sumber daya yang dimiliki, melalui perjanjian dengan atasan langsung sebagai bentuk komitmen antara kedua belah pihak dalam memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Pada perjanjian kinerja juga terdapat perspektif sebagai sudut pandang yang digunakan untuk menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Terdapat perspektif internal dan penguatan anggaran, penerima layanan, serta proses bisnis. Dengan adanya perspektif tersebut, pihak pertama sebagai pelaksana kinerja dapat mengetahui prioritas sasaran yang ingin dicapai berdampak terhadap perspektif tertentu didalam organisasinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai unit eselon II menetapkan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (Perspektif Internal dan Penguatan Anggaran)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 39.413.773.144,-
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1 Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70% (Perspektif Penerima Layanan)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 14.296.697.906,-
		2 Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45% (Perspektif Penerima Layanan)	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 14.929.649.985,-
3.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70% (Perspektif Proses Bisnis)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 3.308.558.573,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024	PROGRAM	ANGGARAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45% (Perspektif Proses Bisnis)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 2.816.454.892,-

Pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024, terdapat perubahan anggaran yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dimana pada anggaran murni sebesar Rp 66.413.387.500,- berubah menjadi Rp Rp 74.765.134.500,- pada anggaran Perubahan 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO PROV. JATIM

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah berhasil mencapai sejumlah capaian signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Fokus utama adalah meningkatkan konektivitas, mengembangkan layanan pemerintah berbasis elektronik, serta memperkuat penyelenggaraan data statistik sektoral dan keamanan informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian berbagai indikator yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Data Statistik dan Keamanan Informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Urusan Kominfo, Data Statistik dan Keamanan Informasi

Indikator	Jawa Timur	Nasional
Indeks SPBE (2024)	4,43	3,12
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (2024)	46,07 (rangking 7)	43,34
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (2024)	78,95	71,79
Indeks Pembangunan Statistik (2024)	3,08 (rangking 4)	2,55
Indeks Keamanan Informasi (2024)	611	-
Indeks Transformasi Digital Nasional	56,38	49,2
Indeks Literasi Digital (2023)	3,75	3,65

A. Capaian indikator Tujuan

Selain capaian pada indikator nasional tersebut, capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam dukungannya pada bidang komunikasi dan informatika.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kominfo Prov. Jatim. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Capaian Sasaran yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2019 – 2024, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

Tujuan Renstra tersebut dengan di dukung 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

INDIKATOR TUJUAN 1

“Indeks SPBE”

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan I

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE	4	4,43	110,75%

Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah **4,43 dengan predikat memuaskan**. Target indeks SPBE tahun 2024 pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah 4,0, sehingga capaian 110,75 %.

Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2018 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

- 2018 : 2,92 predikat baik
- 2019 : 3,1 predikat baik
- 2020 : 3,4 predikat baik
- 2021 : 2,83 predikat baik
- 2022 : 3,30 predikat baik
- 2023 : 3,62 predikat sangat baik
- 2024 : 4,43 predikat memuaskan

Nilai SPBE Jawa Timur Konsisten Meningkatkan 5 Besar Indeks SPBE Nasional 2024



*Menuju
digitalisasi
yang lebih
inklusif dan
berdaya
saing.*



Capaian Nilai Indeks SPBE Jawa Timur



Sumber: KemenpanRB No. 663 Tahun 2024

Pemprov. Jawa Timur

Tabel 3.3
Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	: 4,6
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 4,6
Domain Tata Kelola SPBE	: 4,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 3,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 4,75
Penyelenggara SPBE	: 5
Domain Manajemen SPBE	: 3,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 3,13
Pelaksanaan Audit TIK	: 3
Domain Layanan SPBE	: 4,87
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 4,9
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4,83

Tabel 3.4
Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5

No.	Indikator	Level
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



Dalam peningkatan capaian indeks SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tidak bergerak sendiri, tetapi aktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti akademisi dan praktisi digital serta menggandeng Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada yang tertinggal. Hal ini diharapkan dapat membawa transformasi digital yang inklusif di Jawa Timur, dimana pembangunan layanan digital kepada masyarakat bersifat merata dan menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks SPBE Kabupaten/Kota yang juga meningkat, sebagai berikut:



INDIKATOR TUJUAN 2

“Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu”

Tabel 3.5
Capaian Indikator Tujuan II

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
2.	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	75%	91,79%	122,39%

Per tanggal 8 Januari 2025, Indikator Tujuan Persentase rilis data statistik akurat yang tepat waktu teralisasi sebesar 91,79%, hasil tersebut diatas target tahun 2024 yaitu 75%. Sehingga capaian tahun 2024 sebesar 122,39%. Perhitungan indikator Persentase rilis data statistik akurat yang tepat waktu didapatkan dari jumlah data sektoral yang bersifat terbuka dan terpublikasi ke portal open data Jawa Timur dibagi dengan jumlah daftar data terbuka berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah pada tahun berjalan.

Kategori akurat berdasarkan pada sistem penjenjangan pada pengisian data sektoral dilevel produsen data yang diinput oleh operator,

diverifikasi oleh verifikator serta diverifikasi ulang oleh walidata. Sebelumnya penentuan daftar data juga dilakukan dalam Forum Satu Data yang melibatkan Bappeda selaku koordinator data, BPS selaku pembina data dan Dinas Kominfo sebagai Walidata, pada forum tersebut dibahas mengenai definisi daftar data serta metode pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga data sektoral yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu keterisian metada pada portal open data juga menggambarkan deskripsi dan akurasi dari setiap dataset. Sedangkan kategori tepat waktu berdasarkan pada waktu rilis data yang terinput pada warehouse SATA Jatim sesuai dengan periode daftar data dan dirilis oleh portal Open data secara sistem dalam waktu 24 jam. Selama data sektoral yang diinput pada warehouse SATA Jatim tepat waktu dan sesuai dengan periode daftar data, maka rilis daftar data pada portal open data otomatis menjadi tepat waktu dan sesuai dengan periode.

Penginputan data sektoral oleh produsen data pada portal SATA Jatim menjadi sangat penting untuk menjaga data tetap terupdate dan memenuhi kebutuhan Pemerintahan. Untuk itu dalam rangka meningkatkan motivasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sebagai produsen data, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai inovasi Sata Jatim Award. Penilaian pada SATA Jatim Award tidak hanya terbatas pada ketepatan waktu dan keterisian dataset, tetapi juga kualitas dataset yang dihasilkan, termasuk tata kelola data yang meliputi perencanaan dan relevansi, pengumpulan dan akurasi, pengolahan dan konsistensi, diseminasi, aktualitas dan aksesibilitas.

Portal Open Data Jawa Timur dapat diakses melalui tautan <https://opendata.jatimprov.go.id/>. Dalam portal tersebut terdapat 64 Perangkat Daerah dan 38 Kabupaten / Kota mempublikasikan data statistik sektoral yang bersifat terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Total viewer portal Open Data Jatim sepanjang tahun 2024 sebanyak 55.894 kali dan total download sebanyak 35.774 kali.

Gambar 1. Tampilan Homepage Open Data Jawa Timur



Untuk rumus perhitungan Persentase rilis data statistik akurat yang tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah data terbuka dan terpublish di open data 2024}}{\text{Jumlah data terbuka di SE Sekda 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{1.878}{2.052} \times 100\% = 91,79\%$$

INDIKATOR TUJUAN 3

“Persentase Informasi Persandian yang Diamankan”

Tabel 3.6
Capaian Indikator Tujuan III

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	55%	55,1%	100,2%

Informasi Persandian yang diamankan berdasarkan jenis klasifikasinya menjadi tiga yaitu berita biasa, terbatas dan rahasia. Berdasarkan metode transmisinya dikategorikan menjadi tiga yaitu derajat kecepatan segera, sangat segera dan Kilat.

Seluruh informasi sensitif yang beredar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan sistematis melalui penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHBS) dalam Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) internal. Dengan demikian, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data penting organisasi terjamin.

PHBS yang telah diimplementasikan secara ketat mengatur alur komunikasi, akses pengguna, dan mekanisme enkripsi data. Setiap individu yang terlibat dalam proses pertukaran informasi sensitif diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan yang telah ditetapkan

Sepanjang tahun 2024, dimana informasi persandian yang telah diamankan dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHBS) dalam Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Internal Organisasi Perangkat Daerah melalui sanapati sebanyak informasi persandian yang telah di amankan

dari total 1306 berita yang ditujukan dan bersumber dari sekretariat daerah melalui sanapati. Informasi persandian yang diamankan adalah $(720 / 1306) \times 100\% = 55,1 \%$. Prosentase kebijakan keamanan informasi yang diterapkan adalah dengan menerapkan kebijakan keamanan informasi.

Informasi persandian yang diamankan merujuk pada data atau pesan yang telah dienkripsi atau disandikan agar tidak dapat dengan mudah diakses atau dipahami oleh pihak yang tidak berhak. Sandi digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi, terutama saat data tersebut berpindah melalui jaringan atau disimpan dalam sistem.

Dalam hal keamanan informasi, melalui Forum Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan audit keamanan informasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi.

Tidak semua perangkat daerah memiliki Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat maturitas kesadaran keamanan informasi di perangkat daerah menggunakan instrumen Human Aspect of Information Security Questionnaire (HAIS-Q). Indikator ini masuk dalam penilaian implementasi budaya CETTAR di Perangkat Daerah, sehingga mendorong kesadaran perangkat daerah terhadap keamanan informasi.

Selanjutnya terkait dengan audit keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis wajib menerapkan SNI ISO/IEC 27001. Terkait hal

tersebut maka telah dilakukan Audit Surveillance ISO/IEC 27001 pada Data Center Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data Center Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat ISO/IEC 27001:2022 sehingga setiap tahun perlu dilakukan audit surveillance untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada.

B. Capaian Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur perlu ditentukan Sararan Strategis, antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur;
3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas;
4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi.

Sebagai tolak ukur tercapainya sasaran kinerja maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi;
3. Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online;
4. Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral;
5. Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi

Berikut Analisis Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5	86,5	100,64%	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70%	78,43%	112,04%
		2	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%	85,71%	190,46%
3.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	81,66%	116,66%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45%	45,3%	100,6%	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8
Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5	82,36	83,18	82,85	86,05	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	68%	70%	66,67%	68,63%	78,43%
		2	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	40%	30,90%	69%	71,4%	85,71%
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang di publikasikan	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	34,8%	44,14%	68,48%	81,66%	
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Perangkat Daerah	45%	40,9%	41,18%	42,86%	45,3%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024
	Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi					

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisa bahwa kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada semua indikator sasaran mengalami peningkatan secara berkala sebagai hasil pengukuran kinerja Dinas Kominfo yang meningkat.

- 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5	86,05	100,64%	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70%	78,43%	112,04%
		2	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%	85,71%	190,46%
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang di publikasikan	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	81,66%	116,66%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45%	45,3%	100,67%	

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	86,05	-	-	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	78,43%	-	-
		2	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	85,71%	-	-
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang di publikasikan	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	81,66%	-	-	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45,3%	-	-	

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2024. Hal tersebut didorong oleh komitmen Pimpinan dan sistem kerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan evaluasi secara berkala dapat membantu kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terus meningkat. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Akuntabilitas Kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dengan didasarkan atas dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2024, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Metode pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran 1

Nilai Evaluasi Implementasi
SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
2	3	4		5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah layanan informasi	85,5	82,85	86,05	100,64%

Nilai evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menyusun pohon kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja ini telah berdasarkan kerangka berpikir logis yang dengan menentukan dan menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional, sehingga didapatkan indikator kinerja yang selanjutnya menjadi masukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan periode 2025 – 2029.

Selain itu dalam pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga mempunyai inovasi “Aplikasi Tabel Kominfo” yang memungkinkan setiap pegawai mencatat kinerja harian dan dilengkapi dengan dokumentasi atau data dukung harian yang

secara hirarki/berjenjang dinilai oleh atasan langsungnya. Inovasi tersebut memudahkan setiap pegawai mencatat kinerjanya, termasuk tugas tambahan yang tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Individu dalam aplikasi e-master. Selanjutnya kinerja yang terinput dalam Aplikasi Tabel Kominfo mempermudah pegawai dalam pengisian buku kinerja pada aplikasi e-master.

Selanjutnya dalam hal evaluasi kinerja, sejak tahun 2023 digagas laporan mingguan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur yang menjadi sarana evaluasi Kepala Dinas terhadap kinerja masing-masing bidang dengan indikator kinerja yang detail serta relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang. Dengan adanya laporan mingguan yang dibagikan pada Whatsapp Grup level Ketua Tim hingga Eselon II, Kepala Dinas langsung melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja bahkan secara mingguan.

Dalam rangka implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdapat permasalahan dan alternatif solusi yang telah diterapkan antara lain:

Permasalahan:

1. Indikator dan target kinerja yang masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi dan Perangkat Daerah, menyebabkan target kinerja tidak dapat dengan mudah berubah menyesuaikan dinamika yang ada. Sehingga pengukuran kinerja berdasarkan perencanaan jangka menengah kurang efektif dan agile dalam menghadapi perubahan eksternal dan internal yang berlangsung sangat cepat
2. Belum semua SDM memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan penjenjangan kinerja terutama di level pelaksana dilakukan berdasarkan skema pembagian habis tugas dengan memaksimalkan

SDM yang ada meskipun SDM yang tersedia tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan kinerja tersebut.

Alternatif Solusi:

1. Disusun laporan mingguan sebagai sarana monitoring dan evaluasi dengan indikator yang lebih agile sesuai dengan kebutuhan kinerja yang harus diselesaikan masing-masing pegawai dan secara agregat ditarik menjadi indikator kinerja bidang.
2. Upaya peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki sehingga masing-masing personal sebagai bagian terkecil dari sistem kinerja organisasi dapat berfungsi maksimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui sertifikasi, kegiatan workshop dan seminar serta kerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur dan BPSDM Kementerian KomDigi RI

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur

Indikator Sasaran 2

Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1 Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	68%	71,4%	78%	112,04%

Definisi Operasional Indikator :

1. Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik diwajibkan menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik kepada publik/masyarakat;
2. Standart Layanan Informasi dilihat dari informasi berkala (Pasal 9 UU KIP), informasi serta merta (Pasal 10 UU KIP), dan informasi setiap saat (Pasal 11 UU KIP), yang di publish di website PPID OPD maupun PPID Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator Persentase OPD Provinsi Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023,

dikarenakan pada tahun 2024 PPID Provinsi Jawa Timur aktif melakukan pendampingan dan desk PPID kepada PPID Pelaksana di lingkup Pemprov. Jatim dan PPID Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Upaya yang telah dilakukan PPID Provinsi Jawa Timur melalui pengiriman surat permohonan data ke Perangkat Daerah dan Kab/Kota untuk menyerahkan update SK, Daftar Informasi Publik tahun 2024 dan Laporan layanan informasi publik tahun 2023 kepada PPID Provinsi Jawa Timur. Selain itu sebagai salah satu pengampu indikator budaya CETTAR pada SIBEKISAR, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga menggunakan indikator pelaksanaan PPID untuk mendorong perangkat daerah dan Kabupaten/Kota lebih aktif dalam melaksanakan PPID diwilayahnya. Dinas Kominfo selaku PPID Utama/Provinsi Jawa Timur juga menambah aspek menu PPID laman web Badan Publik sebagai salah satu wujud implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap standar layanan informasi publik.

Perhitungan indikator sasaran Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi didapatkan melalui:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur}} \times 100\%$$

$$\frac{43 + 37}{64 + 38} \times 100\% = 78,43\%$$

Nilai keseluruhan tersebut dicapai pada tahun 2024 dengan rincian capaian tiap triwulan sebagai berikut:

1. Triwulan I tahun 2024 jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standar layanan informasi sejumlah 31 OPD dan 36 Kab/Kota (65,68%)

2. Triwulan II tahun 2024 jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi sejumlah 32 OPD dan 37 Kab/Kota (67,64%)
3. Triwulan III tahun 2024 jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi sejumlah 40 OPD dan 37 Kab/Kota (75,49%)
4. Triwulan IV tahun 2024 jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi sejumlah 43 OPD dan 37 Kab/Kota (78,43%)

Kriteria memenuhi standart layanan informasi tersebut diambil dari Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/Kota yang telah mempunyai informasi Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat sebagai salah satu kewajiban badan Publik.

Dalam rangka capaian indikator Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi, terdapat permasalahan dan alternatif solusi yang telah diterapkan antara lain:

Permasalahan :

1. Seringnya rotasi dan mutasi pegawai yang menyebabkan *transfer knowledge* tidak tersampaikan dari pengelola sebelumnya.
2. Kurangnya pemahaman pengelola PPID terhadap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada instrumen PPID seperti penyusunan DIP, uji konsekuensi dan cara menjawab permohonan informasi, sehingga menyebabkan PPID tidak berjalan optimal;
3. Beberapa masih menganggap PPID sebagai tugas tambahan sehingga tidak dilaksanakan secara optimal.

Alternatif Solusi :

1. Koordinasi yang terus dilakukan PPID Provinsi Jawa Timur dengan PPID Pelaksana di tingkat PD dan PPID Kabupaten/Kota

- melalui surat permohonan data ke Perangkat Daerah dan Kab/Kota untuk menyerahkan update SK, DIP tahun 2024 dan Laporan layanan informasi publik tahun 2023 ke PPID Provinsi
2. Koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan melalui pendampingan, monev serta pelatihan dan pembinaan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Timur seperti Bimbingan Teknis PPID, Rakor PPID, FGD PPID
 3. Konsultasi serta pendampingan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Jawa Timur kepada PPID Pelaksana (PD).

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur

Indikator Sasaran 2

Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online

Layanan publik online atau e-government merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan publik secara elektronik. Dengan menggunakan platform digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Beberapa karakteristik umum dari layanan publik online melibatkan penggunaan internet, aplikasi mobile, dan teknologi informasi lainnya untuk menyediakan berbagai layanan.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	2. Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%	71,4%	85,71%	190,46%

Daftar Perangkat Daerah Yang Memiliki Layanan Publik Online Tahun 2024:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
9. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
13. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
16. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

17. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
19. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Kependudukan Provinsi Jawa Timur
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
23. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
24. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
26. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
28. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
29. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
30. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
31. Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
32. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
33. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
34. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
35. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
36. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Layanan Publik Online 2024:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat daerah yang memiliki Layanan Publik Online}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{36}{42} \times 100\% = 85,71\%$$

Dalam rangka capaian indikator Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online, terdapat permasalahan dan alternatif solusi yang telah diterapkan antara lain:

Permasalahan:

1. Tidak semua orang memiliki akses internet atau perangkat digital yang setara, sehingga mungkin ada kesenjangan aksesibilitas;
2. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi isu penting yang harus diatasi agar masyarakat merasa aman menggunakan layanan online;
3. Beberapa warga mungkin tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk menggunakan layanan online, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital;
4. Tantangan teknis terkait integrasi sistem yang berbeda dalam penyediaan layanan publik online;
5. Penting untuk memastikan bahwa layanan online mematuhi peraturan dan kebijakan privasi yang berlaku;
6. Diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas internet yang cepat dan handal, untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik online.

Alternatif Solusi:

1. Penyediaan sarana internet pada lokasi yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja di area publik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pemerintah secara langsung;
2. Proses integrasi sistem yang terus dikembangkan dapat menjadi sarana otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat penanganan permintaan;
3. Penyediaan informasi tentang layanan publik online pada ruang komunikasi publik sehingga memperbesar publikasi kepada masyarakat tentang layanan berbasis digital yang dimiliki Pemerintah, terutama

terkait dengan persyaratan layanan publik, mekanisme, dan kebijakan pemerintah. Informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pemerintah

4. Pengembangan sistem keamanan informasi terhadap data pribadi masyarakat yang masuk dalam sistem layanan publik online akan terus diterapkan dengan berbasis kebijakan dan pengembangan teknologi/infrastruktur digital. Petunjuk teknis yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE akan disusun sebagai panduan teknis keamanan informasi di Jawa Timur.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas

Indikator Sasaran 3

Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	68,48%	81,66%	116,66%

Realisasi indikator sasaran Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral yang dihitung hingga tanggal 10 Januari 2025 pukul 16.00 WIB, menunjukkan capaian realisasi sebesar 81,66%, hasil tersebut diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 70%, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 116,66%. Perhitungan indikator persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral didapatkan dari jumlah keterisian data pada portal SATA Jatim dibagi dengan target isian data di tahun berjalan.

Perhitungan Indikator Sasaran **Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral** sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kamus data yg sudah terisi isian data}}{\text{Jumlah kamus data yang masuk dalam portal SATA Jatim}} \times 100\%$$
$$= \frac{7.240}{8.866} \times 100\% = 81,66 \%$$

Portal Satu Data Jawa Timur dapat diakses melalui tautan <http://sata.jatimprov.go.id/>. Perangkat Daerah selaku Produsen Data melakukan pengisian data sesuai dengan periode data (harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan). Dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam sasaran keterisian data, dilakukan monitoring keterisian data setiap triwulan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya monitoring tersebut diharapkan Perangkat Daerah sebagai produsen data dapat mengisi data sesuai dengan periode yang telah disepakati.

Dalam rangka capaian indikator Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral, terdapat permasalahan dan alternatif solusi yang telah diterapkan antara lain:

Permasalahan :

1. Sebanyak 77,57% data di Portal SATA Jatim memiliki periode tahunan dan baru dapat dilakukan pengisian oleh Produsen Data di h+1 atau tahun berikutnya yaitu Januari 2025;
2. Kurang maksimalnya respon Perangkat Daerah sebagai produsen data untuk menyerahkan data tepat waktu;
3. Beberapa data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah masih perlu rekonsiliasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat rilis;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Statistisi di Perangkat Daerah.

Solusi :

1. Melaksanakan monitoring keterisian data setiap triwulan agar pemenuhan data tepat waktu;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan SDM yang ada seperti: bimtek, webinar dan lain – lain;
3. Memberikan penghargaan bagi Verifikator dan Operator Terbaik Perangkat Daerah dalam SATA Award, sehingga mendorong semangat untuk selalu aktif menyerahkan data;
4. Menyediakan layanan PLASTIK (Pusat Layanan Statistik) untuk memberikan konsultasi statistik, survei statistik dan permohonan data statistik sektoral.

Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi

Indikator Sasaran 4

Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45%	42,86%	45,3%	100,6%

Mematuhi kebijakan keamanan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia teknologi. Keamanan informasi mencakup perlindungan terhadap data dan sistem informasi dari ancaman dan risiko yang dapat merugikan organisasi. Adherence (patuh) terhadap kebijakan keamanan informasi dapat membantu mencegah pelanggaran keamanan, melindungi informasi rahasia, dan menjaga integritas serta ketersediaan data.

Human Aspect of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pada perangkat daerah. Instrumen ini terdiri dari tujuh area dan masing masing area terdapat tiga sub area yang perhatian pada keamanan. Tiap area diukur dari aspek pengetahuan, sikap dan perilaku. Total dari pertanyaan adalah 63 (enam puluh tiga) pertanyaan yang berupa skala likert yang cukup memilih angka 1 sampai dengan 5. Angka satu merepresetasikan sangat tidak setuju dan angka 5 merepresentasikan angka sangat setuju.

Aspek pada instrumen HAIS-Q meliputi aspek manajemen password, penggunaan surat elektronik, penggunaan internet, penggunaan sosial media, pelaporan insiden, penggunaan perangkat bergerak, dan penanganan informasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran keamanan informasi mengindikasikan semakin tinggi tingkat kepatuhan kebijakan keamanan informasi.

Tabel 3.16
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMPROV. JATIM
YANG MEMATUHI KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim
7	Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
8	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

NO	PERANGKAT DAERAH
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DIS ESDM) Provinsi Jawa Timur
12	Dinas Perhubungan (DISHUB) Provinsi Jawa Timur
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
15	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
17	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
18	Bakorwil Pembangunan dan Pemerintahan III - Malang Provinsi Jawa Timur
19	Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
20	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
21	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
22	RSUD Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur
23	RSUD Karsa Husada Batu Provinsi Jawa Timur
24	RSUD dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur
25	RSUD Daha Husada Provinsi Jawa Timur
26	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur
27	RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur
28	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
29	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Perhitungan Indikator Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim yang mematuhi kebijakan keamanan informasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah Pemprov. Jatim}} \times 100\%$$

$$\frac{29}{64} \times 100\% = 45,31\%$$

Dalam rangka capaian indikator Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim yang mematuhi kebijakan keamanan informasi, terdapat permasalahan dan alternatif solusi yang telah diterapkan antara lain:

Permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman aparatur mengenai pentingnya keamanan informasi.
2. Tidak adanya sanksi atau insentif yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi.
3. Penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak oleh pegawai pemerintahan.
4. Minimnya pelaporan insiden keamanan informasi, sehingga ancaman sering kali tidak terdeteksi lebih awal.
5. Minimnya penerapan teknologi persandian dan enkripsi dalam komunikasi dan penyimpanan data sensitif.
6. Tidak semua perangkat daerah memiliki *Security Operations Center* (SOC) untuk memantau dan merespons insiden siber.

Alternatif Solusi:

1. Mekanisme audit dan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan keamanan informasi di setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur tentang keamanan informasi.
2. Penghargaan bagi perangkat daerah yang patuh terhadap kebijakan keamanan informasi yang diberikan melalui penilaian indikator Budaya CETTAR dalam SIBEKISAR yang salah satu indikatornya adalah evaluasi keamanan informasi melalui awarness Perangkat Daerah
3. Pelatihan rutin bagi aparatur pemerintah terkait keamanan informasi, berbasis HAIS-Q.
4. Workshop dan simulasi serangan siber (*Cyber Security Drill*) untuk meningkatkan kesiapan perangkat daerah menghadapi ancaman digital.

5. Kampanye literasi digital dan keamanan informasi, terutama mengenai pengelolaan password yang aman, cara mengenali phishing dan serangan siber lainnya, serta prosedur pelaporan insiden keamanan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.17

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	100,64%	98,22%	2,42%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	112,04%	99,57 %	12,47%
		Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	190,46%	99,71 %	90,75%
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang di publikasikan	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	116,66%	99,51%	17,15%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	100,6%	99,38 %	1,22%

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran, di mana Tingkat Efisiensi dihitung sebagai selisih antara keduanya. Semakin besar tingkat efisiensi, semakin tinggi pencapaian kinerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.

No	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Analisis Efisiensi
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	100,64%	98,22%	2,42%	Cukup Efisien – Kinerja melampaui anggaran yang terserap, tetapi margin efisiensinya terbatas, dikarenakan realisasi belanja pegawai
2.	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	112,04%	99,57 %	12,47%	Efisien – Pencapaian kinerja tinggi dengan anggaran yang relatif hemat
	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	190,46%	99,71 %	90,75%	Sangat Efisien – Kinerja hampir dua kali lipat dari target dengan anggaran optimal.
3.	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	116,66%	99,51%	17,15%	Efisien – Kinerja Data statistik meningkat pesat dengan anggaran yang masih terkendali.
4.	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	100,6%	99,38 %	1,22%	Cukup Efisien – Pencapaian hanya sedikit lebih tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan.

Tingkat Efisiensi di Bawah 5% dengan kategori Cukup Efisien pada sasaran Akuntabilitas Kinerja (2,42%) dan Kepatuhan Keamanan Informasi (1,22%) memerlukan evaluasi dengan mempertimbangkan faktor penyebab dan upaya untuk lebih efisien dalam meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran yang terbatas. Perlu dilakukan fokus pada program berbasis digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dengan biaya lebih terjangkau.

Tingkat Efisiensi 5-20% dengan kategori efisien pada sasaran Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik (17,15%) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Standar Layanan Publik (12,47%) memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi. Peningkatan kinerja jauh lebih tinggi dibanding anggaran yang dikeluarkan.

Tingkat Efisiensi >50% dengan kategori Sangat Efisien pada Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik Online (90,75%), namun perlu diperhatikan kembali target indikator yang disesuaikan dengan kondisi terbaru. Namun demikian dapat direkomendasikan bahwa digitalisasi layanan publik terbukti efektif dan efisien, sehingga alokasi anggaran dapat ditingkatkan untuk memperluas cakupan layanan digital. Sistem pelayanan berbasis elektronik dapat diadopsi lebih luas di sektor lain untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3.18
Capaian program/kegiatan

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Sasaran 1							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	85,5	86,05	100,64	39.413.773.144	38.712.775.923	98,22%
	Evaluasi			%			
	Implementasi SAKIP						
	Perangkat Daerah						
Sasaran 2							
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70%	78,43 %	112,04 %	14.929.649.985	14.886.673.707	99,71%
	Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%	85,71 %	190,46 %			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Sasaran 3							
Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang di publikasikan	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	81,66 %	116,66 %	3.308.558.573	3.292.412.729	99,51%
Sasaran 4							
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45 %	45,3 %	100,6 %	2.816.454.892	2.798.955.947	99,38%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Program/Kegiatan yang Berhasil dan Efektif
Digitalisasi layanan publik pada Sasaran 2 sangat berhasil, dengan capaian 190,46% untuk indikator layanan publik online dan 112,04% untuk indikator keterbukaan informasi publik. Ketersediaan data statistik pada Sasaran 3 juga meningkat dengan efisiensi tinggi (116,66%). Akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sasaran 1 tercapai dengan efisiensi baik (100,64%).
- Program yang Perlu Evaluasi
Keamanan Informasi pada Sasaran 4 hanya mencapai kinerja sebesar 100,6%, meskipun realisasi anggaran mencapai 99,38%. Terdapat indikasi bahwa meskipun dana telah terserap, kebijakan keamanan informasi belum menunjukkan peningkatan signifikan.

- Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja
 1. Digitalisasi dan Infrastruktur Teknologi, Implementasi layanan publik berbasis digital telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Pemanfaatan teknologi untuk keterbukaan informasi memungkinkan OPD mencapai target di atas 100%.
 2. Manajemen Anggaran yang Efisien, Sebagian besar program memiliki serapan anggaran mendekati 100% dengan capaian kinerja yang jauh melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa dana dialokasikan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan program.
 3. Keterlibatan dan Komitmen PD, Keberhasilan implementasi SAKIP menunjukkan bahwa OPD telah menjalankan program peningkatan akuntabilitas dengan baik.

- Faktor Penghambat Kinerja

Kurangnya Efektivitas Program Keamanan Informasi, Capaian kinerja hanya meningkat 0,6% di atas target, tetapi anggaran telah terserap hampir penuh. Kemungkinan penyebab:

- a. Kurangnya kesadaran SDM terhadap keamanan informasi.
- b. Belum optimalnya sistem keamanan siber yang diterapkan di OPD.
- c. Belum adanya mekanisme evaluasi yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan keamanan informasi.

- Rekomendasi untuk Perbaikan Program di Masa Depan

1. Optimalisasi Keamanan Informasi (Sasaran 4), Perlu revisi strategi penerapan kebijakan keamanan informasi, termasuk pelatihan intensif dan evaluasi berkala. Penerapan sistem pemantauan keamanan siber secara real-time untuk meningkatkan kepatuhan perangkat daerah. Audit dan evaluasi mendalam terhadap efektivitas anggaran keamanan informasi.
2. Meningkatkan Efisiensi pada Program yang Sudah Sukses (Sasaran 2 & 3). Meskipun layanan digital dan keterbukaan data sudah sangat baik, diperlukan evaluasi untuk memastikan

keberlanjutan efisiensi anggaran di masa depan. Membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan startup teknologi untuk meminimalkan anggaran APBD dalam pengembangan layanan digital.

3. Pemanfaatan Keberhasilan Digitalisasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD. Integrasi sistem digital yang sudah sukses (Sasaran 2) ke dalam sistem manajemen akuntabilitas kinerja (Sasaran 1). Mendorong otomatisasi laporan kinerja berbasis AI dan Big Data agar akuntabilitas kinerja semakin optimal dengan anggaran yang lebih efisien.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPPA APBD tahun 2024. Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada perubahan tahun 2024 sebesar Rp 74.765.134.500,- dan terealisasi sebesar Rp 73.926.090.034,- atau sebesar 98,88% yang lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,14%.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
A	BELANJA DAERAH	74.765.134.500,00	73.926.090.034,00	98,88
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.413.773.144,00	38.712.775.923,00	98,22
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>268.405.505,00</i>	<i>267.773.210,00</i>	<i>99,76</i>
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>305.000.000,00</i>	<i>304.835.020,00</i>	<i>99,95</i>

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	736.690.000,00	736.326.400,00	99,95
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2.476.700.380,00	2.475.607.208,00	99,96
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	6.573.581.672,00	6.554.144.217,00	99,70
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.094.990.587,00	2.083.402.574,00	99,45
2.	Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	14.296.697.906,00	14.235.271.728,00	99,57
	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</i>	14.296.697.906,00	14.235.271.728,00	99,57
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.929.649.985,00	14.886.673.707,00	99,71
	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.934.854.224,00	2.926.438.769,00	99,71
	<i>Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	11.994.795.761,00	11.960.234.938,00	99,71
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3.308.558.573,00	3.292.412.729,00	99,51
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	3.308.558.573,00	3.292.412.729,00	99,51
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.816.454.892,00	2.798.955.947,00	99,38
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.465.653.892,00	2.448.501.647,00	99,30
	<i>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</i>	350.801.000,00	350.454.300,00	99,90

Berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi anggaran, hal ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perencanaan anggaran di periode berikutnya. Realisasi anggaran yang baik melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk bagian Sekretariat dan Bidang-bidang, sehingga dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan serta memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi SAKIP tahun 2024, Tim evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyelaraskan target pada dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya, serta menambahkan formulasi perhitungan dan definisi operasional terhadap masing-masing indikator kinerja;
2. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip *logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang;
3. Perlu dilakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan menampilkan identifikasi *crosscutting* yang memanfaatkan penjenjangan kinerja yang disusun sebelumnya dan tidak hanya sebatas mengidentifikasi nomenklatur program dan kegiatan dari lintas Perangkat Daerah;
4. Merumuskan kembali pohon kinerja dengan menelaah ulang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja agar lebih relevan dengan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan *levelling* yang sesuai;
5. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya kedalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
6. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan menambahkan informasi terkait progres dan kendala selama mencapai kinerja

sehingga bisa dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan dalam merumuskan perubahan strategi untuk mengawal capaian kinerja tahunan;

7. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja melalui “Aplikasi Tabel Kominfo” dilengkapi dengan manual book yang tertuang dalam sistem pengukuran kinerja yang dimiliki dalam penentuan strategi/kebijakan untuk mencapai pencapaian kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai bentuk komitmen pimpinan, serta dimanfaatkan sebagai sarana monitoring evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk kontrol pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja sesuai format dan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi yang berpedoman pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta mendorong pemanfaatan informasi yang tertuang dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan strategi serta aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja kedepannya;
9. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyusun SK Tim SAKIP dan dituangkan pada laporan hasil evaluasi yang memuat catatan dan rekomendasi yang menjawab akar permasalahan agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP internal. Serta melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal untuk perbaikan signifikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindak lanjut antara lain:

1. Upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan telah dilakukan dengan menambahkan formulasi perhitungan dan definisi operasional dari indikator tujuan, sasaran, hingga sub kegiatan. Penyelarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja dilakukan terutama sebagai capaian target hasil akhir RPJMD 2019-2024. Meskipun tidak dapat melakukan perubahan target kinerja pada dokumen PK karena menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang tidak bisa dengan mudah berubah, namun capaian kinerja dapat tetap optimal sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan.
2. Berdasarkan desk penyusunan pohon kinerja dengan Kementerian PANRB yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi, Pohon kinerja yang tersusun telah memenuhi prinsip *logical framework* dan menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan critical success factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja. Pohon kinerja telah diperbaiki indikator kinerja pada CSF di urusan persandian sesuai Berita Acara.
3. Pohon kinerja yang tersusun berdasarkan kondisi outcome yang ingin dicapai dan penjenjangan kinerja diturunkan hingga dilevel pelaksana dengan terlebih dahulu mengesampingkan nomenklatur perogram dan kegiatan, agar penyusunan pohon kinerja lebih ideal. Pohon kinerja tersebut ditambahkan dengan identifikasi crosscutting lintas Perangkat Daerah dan stakeholder yang terlibat dalam pemenuhan indikator kinerja.
4. Mereview pohon kinerja dengan masing-masing Bidang sesuai Berita Acara hasil desk penyusunan pohon kinerja dengan KemenPANRB. Melalui review tersebut dirumuskan kembali pohon kinerja dengan menelaah ulang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja agar lebih relevan dengan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan levelling yang sesuai.
5. Memanfaatkan pohon kinerja dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas Kominfo Periode

2025 – 2029, terutama dalam pemanfaatan indikator dan outcome sebagai tujuan Dinas Kominfo, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik.

6. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pada aplikasi Tabel Kominfo dengan menambahkan informasi terkait kendala selama mencapai kinerja, sehingga pimpinan langsung bisa mengevaluasi dan melakukan pertimbangan dalam merumuskan perubahan strategi untuk mengawal capaian kinerja tahunan
7. Dengan pengembangan dan peningkatan pada pengukuran kinerja melalui aplikasi Tabel Kominfo, diharapkan mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih transparan.
8. Memanfaatkan evaluasi kinerja tahun 2024 sebagai baseline capaian kinerja yang menentukan target pada dokumen perencanaan 2025 – 2029.
9. Melaksanakan evaluasi SAKIP internal pada tahun 2024 dengan adanya Tim SAKIP Dinas Kominfo yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan hasil evaluasi, dimana hasil evaluasi memuat catatan dan rekomendasi yang menjawab akar permasalahan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan yang merefleksikan tahap akhir pencapaian kinerja pada pelaksanaan Renstra 2019 - 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2024 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur secara umum memuat 3 (tiga) Indikator Tujuan dan 5 (lima) Indikator Sasaran.

Sepanjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sangat baik dan berhasil mencapai target akhir RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, dimana semua target telah tercapai dengan optimal dengan efisiensi anggaran yang baik. Namun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga akan terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memberikan dukungan layanan yang prima kepada masyarakat, dan juga mendorong keterlibatan dan komitmen seluruh unit kerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga akan memperkuat koordinasi agar tercipta efektifitas pencapaian kinerja dan efisiensi sumber daya.

Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain.

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
2. Melibatkan pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang dapat membantu dalam perencanaan perbaikan kinerja.;
3. Menginisiasi media monitoring melalui aplikasi berbasis online yang dapat memantau perkembangan isu, persepsi masyarakat dan perspektif media akan suatu kebijakan pemerintah. Aplikasi ini menjadi dasar penyusunan isu publik yang pada akhirnya akan memproduksi konten media pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
4. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kepada Perangkat daerah yang bersangkutan. Aplikasi yang akan dibangun harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi;
5. Memperbarui rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencakup tujuan dan inisiatif baru yang mendukung perbaikan kinerja dan mengatasi tantangan yang dihadapi;
6. Menentukan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan strategis. Identifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan;
7. melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan tugas yang semakin kompleks;
8. Memperbarui atau meningkatkan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Timur dan memastikan bahwa sistem dan perangkat yang digunakan mendukung efisiensi operasional dan pemenuhan tugas;

9. Meningkatkan sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman siber. Implementasikan praktik keamanan terbaik untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data;
10. Manjalin kerja sama dengan pihak terkait, baik itu instansi pemerintah lain, sektor swasta, atau lembaga akademis. Kolaborasi dapat meningkatkan pertukaran informasi dan sumber daya;
11. Memantau dan mengadopsi inovasi teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. mengevaluasi dan menguji coba teknologi baru yang dapat mendukung tujuan organisasi;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada periode mendatang.

LAMPIRAN

I. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN, S.Si., M.IP

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATIM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN, S.Si., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750805 199803 2 002

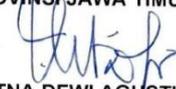
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Perspektif (5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,5	Internal dan Penguatan Anggaran
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan Layanan Infrastruktur di Jawa Timur	1) Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	70%	Penerima Layanan
		2) Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	45%	Penerima Layanan
3.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	70%	Proses Bisnis
4.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	45%	Proses Bisnis

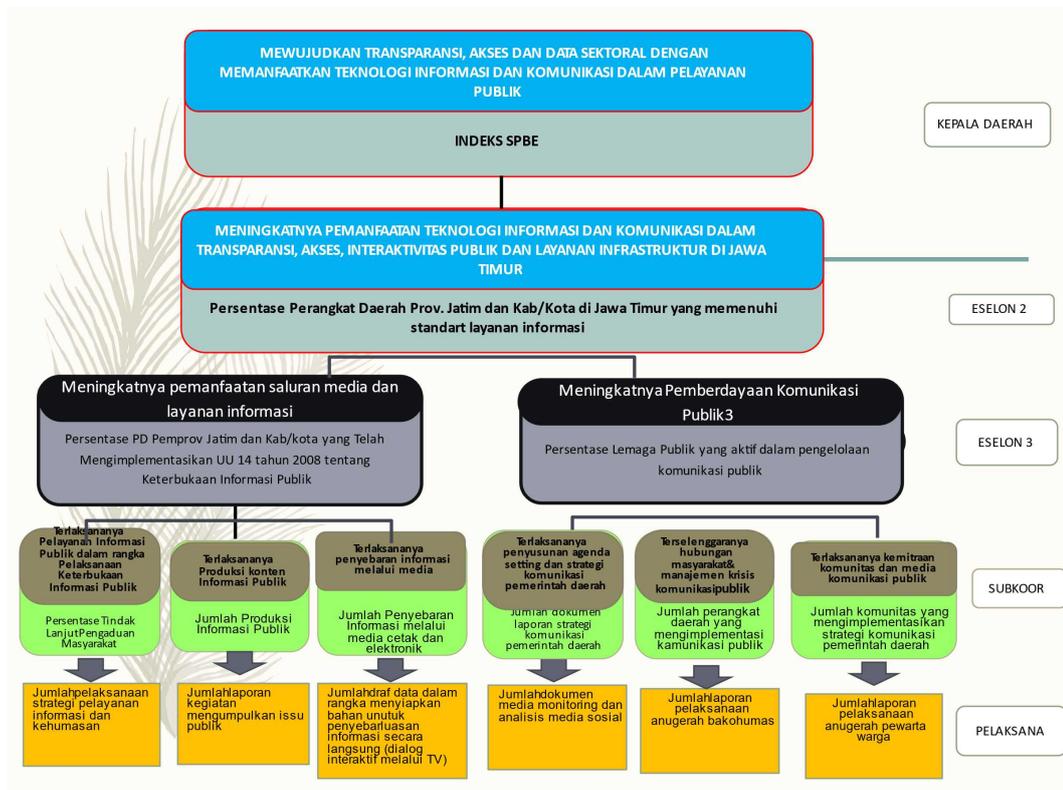
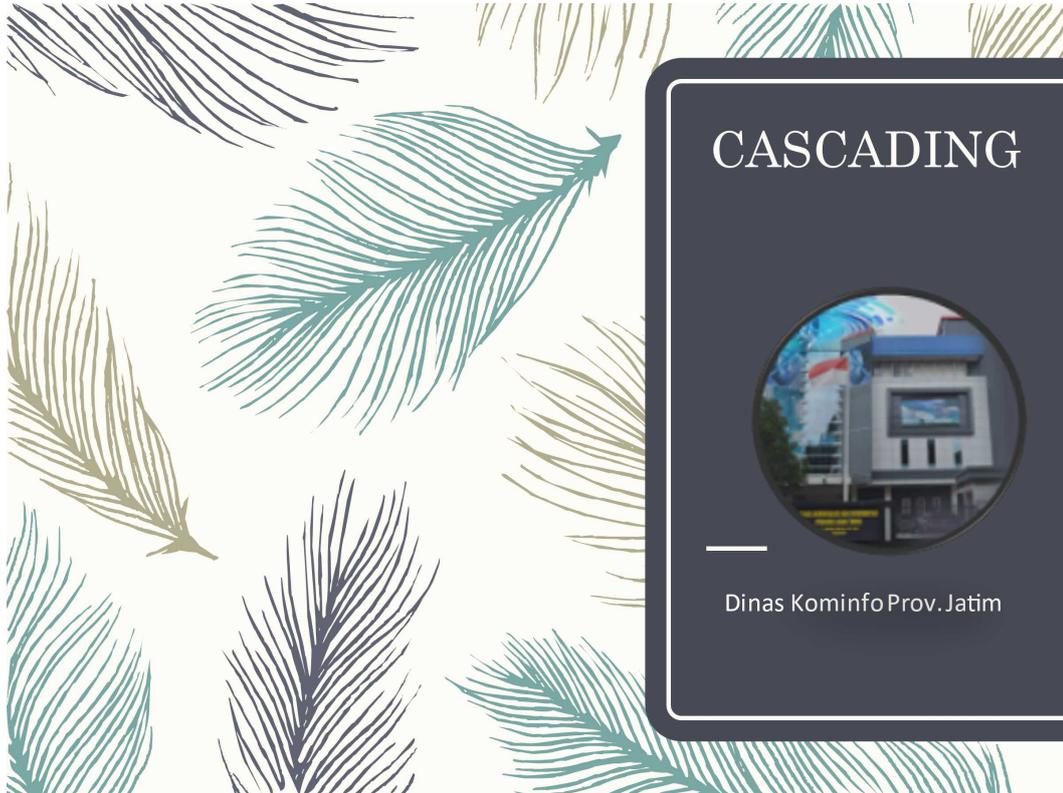
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 39.413.773.144,-	P-APBD
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 14.296.697.906,-	P-APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 14.929.649.985,-	P-APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 3.308.558.573,-	P-APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 2.816.454.892,-	P-APBD
Jumlah	Rp 74.765.134.500,-	

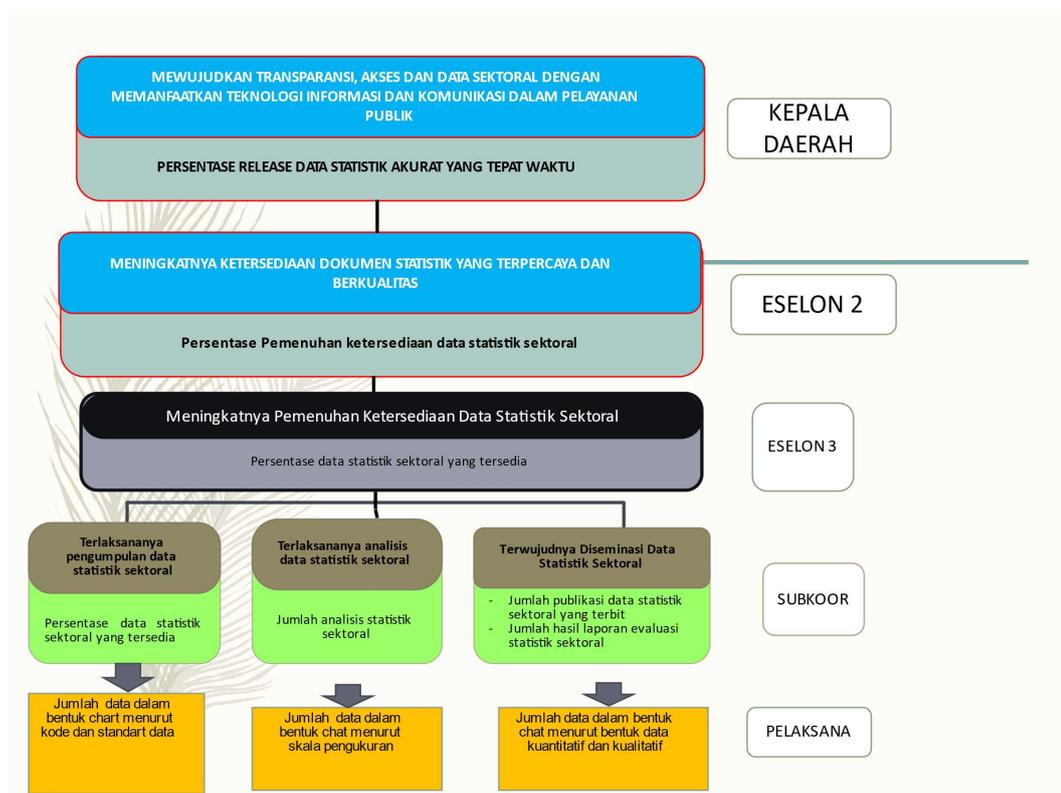
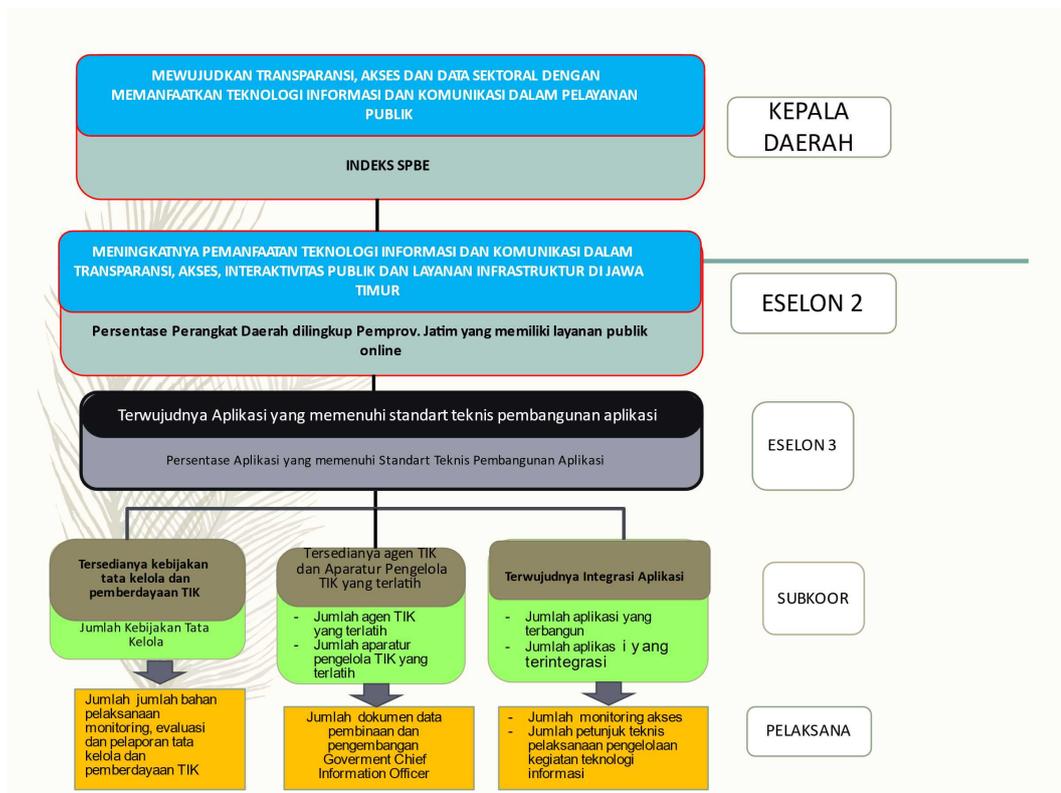
Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

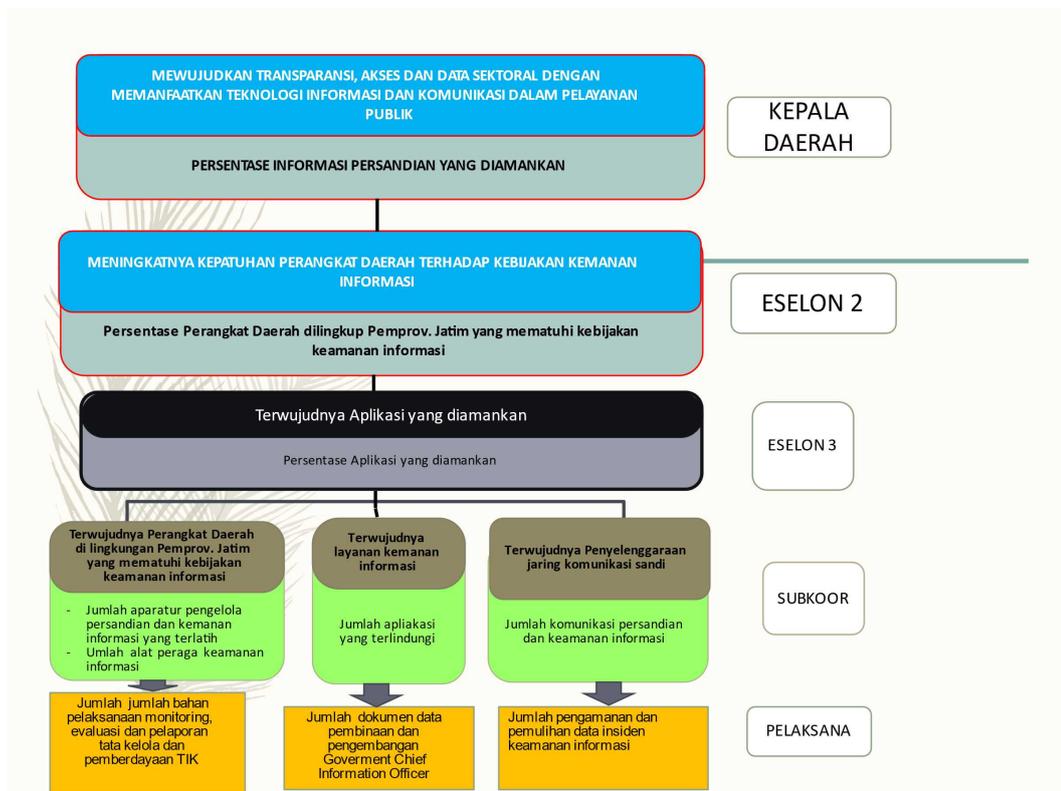
ADHY KARYONO

Surabaya, November 2024
 Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN, S.Si., M.IP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750805 199803 2 002

II. CASCADING KINERJA







III. POHON KINERJA



Pohon Kinerja DINAS KOMINFO PROVINSI JATIM

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun **Dokumen Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur**. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari perencanaan kinerja yang berbasis outcome dan output, serta memetakan Critical Success Factors (CSF) yang menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian ultimate outcome yang menjadi target.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya perencanaan kinerja berbasis hasil. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dokumen Pohon Kinerja ini dirancang untuk menjadi panduan strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya sehingga selaras dalam mencapai hasil yang diharapkan dari instansi.

Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kearah yang lebih baik, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Timur transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong terciptanya kinerja pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur



SHERLITA R.D.A. S.Si. M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750805 199802 2 002

Penentuan Outcome Diskominfo



Kategori	Uraian Masalah	Kinerja (Outcome)
Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal. <ul style="list-style-type: none"> Capaian indeks SPBE Th 2023 sebesar 3,62 dalam kategori sangat baik, tetapi belum memenuhi target IKD Pemprov Jatim sebesar 3,8 Capaian Indeks Masyarakat Digital Jawa Timur tahun 2023 45,59 Belum optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (capaian indeks Pembangunan statistik tahun 2023 sebesar 2,21 dengan kategori cukup) Tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemprov Jatim yang perlu ditingkatkan. (Capaian indeks KAMI di angka 493 dengan kategori "Cukup Baik") 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi. Terselenggaranya pemerintahan yang informatif dan partisipatif Meningkatnya Tingkat kematangan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral di Jatim Meningkatnya tingkat kematangan siber & sandi Pemprov Jatim. Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang urusan pemerintahan.
Mandat	<p>Tata kelola penunjang urusan pemerintahan yang perlu ditingkatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2023 sebesar 82,85 (turun dari tahun 2022 sebesar 83,18) Nilai IP ASN Dinas Kominfo tahun 2023 sebesar 79,557 	
Harapan Masyarakat/ Stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> Akses layanan kepada masyarakat secara digital yang lebih baik dan lebih mudah Satu Data Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / stakeholder Masyarakat mendapatkan informasi dan mendapatkan respon terhadap keluhan yang disampaikan 	

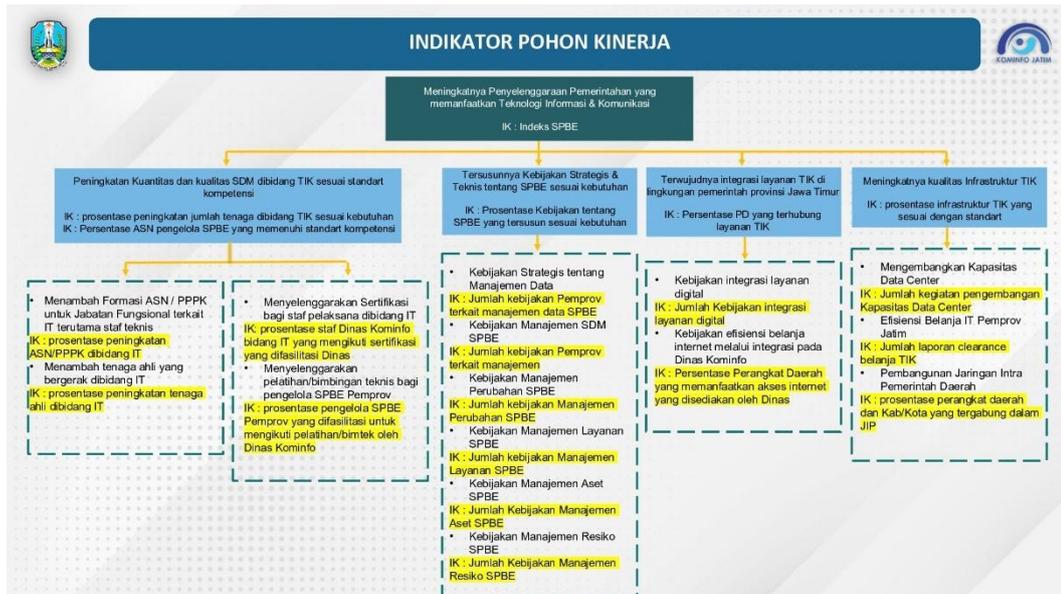


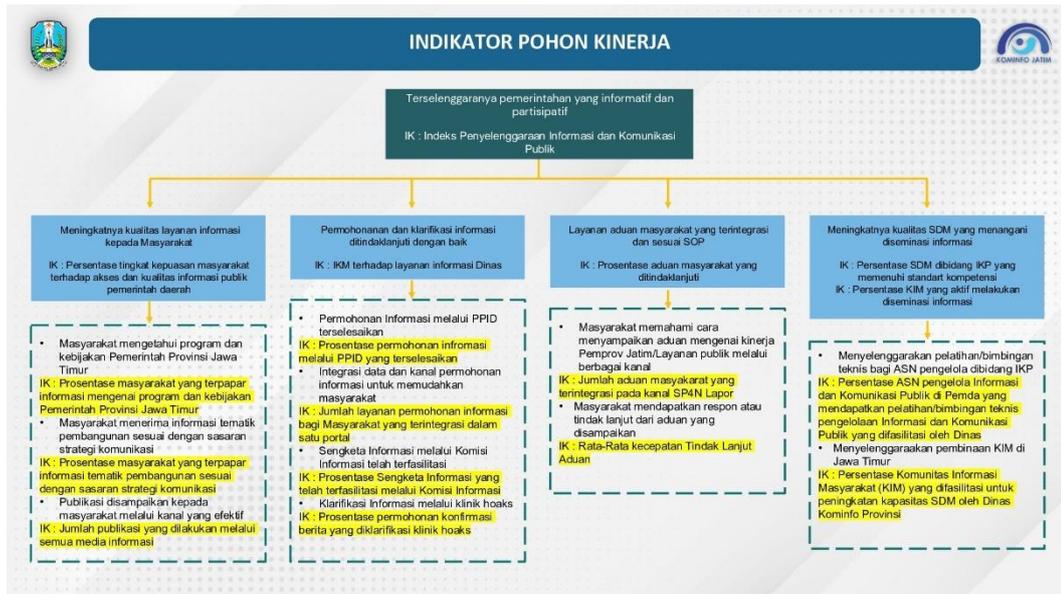
Mengidentifikasi CSF (Critical Success Factor)



1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi

Faktor Penyebab	Kondisi yang Diperlukan
1. Minimnya SDM dibidang IT	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang TIK
2. Komitmen Pimpinan	2. Penyusunan Kebijakan Strategis & Teknis tentang Manajemen SPBE 3. Komitmen Pimpinan tentang efisiensi dan integrasi yang ingin dicapai melalui SPBE
3. Kurangnya Infrastruktur	4. Meningkatnya Fasilitas Infrastruktur





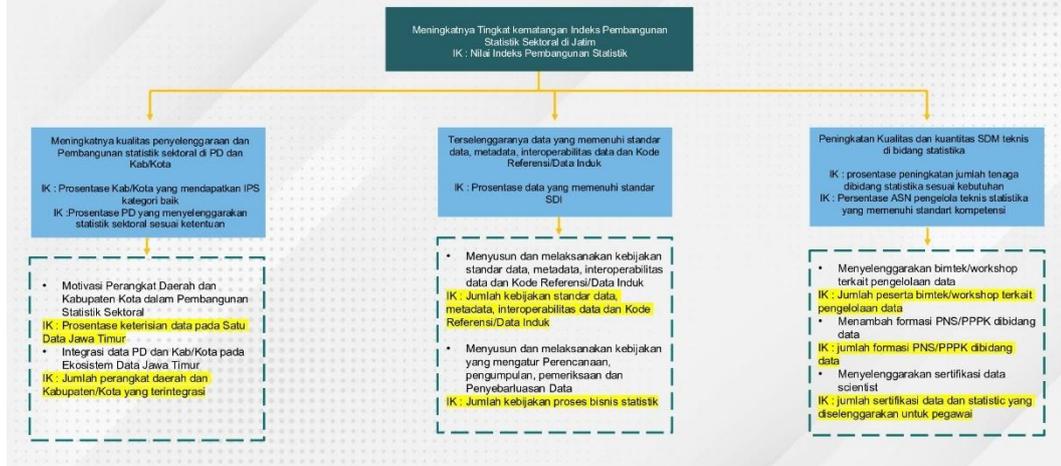
Mengidentifikasi CSF (Critical Succes Factor)

3. Meningkatkan Tingkat kematangan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral di Jatim

Faktor Penyebab	Kondisi yang Diperlukan
1. Belum optimalnya proses bisnis yang dilakukan produsen data untuk memperoleh data statistik sektoral yang berkualitas (GSBPM (General Statistical Business Process Model))	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan Pembangunan statistik sektoral di PD dan Kab/Kota
2. Belum semua PD & Kab/Kota sadar pentingnya penyelenggaraan dan Pembangunan statistic sektoral	
3. Belum optimalnya pemenuhan data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia	2. Terselenggaranya data yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan Kode Referensi/Data Induk
4. Minimnya SDM dibidang Statistika	3. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM teknis di bidang statistika



INDIKATOR POHON KINERJA



Mengidentifikasi CSF (Critical Succes Factor)



4. Meningkatnya tingkat kematangan siber & sandi Pemprov Jatim

Faktor Penyebab	Kondisi yang Diperlukan
1. Minimnya SDM Pelaksana Teknis dibidang Keamanan Informasi & Persandian	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM Pelaksana Teknis dibidang Keamanan Informasi & Persandian
2. Kurangnya Awareness dari Perangkat Daerah terkait Kamanan Informasi	2. Meningkatnya Awareness dari Perangkat Daerah terkait Keamanan Informasi melalui persandian
3. Belum adanya kebijakan di daerah yang menjadi turunan Peraturan Perundang-undangan terkait keamanan informasi	3. Terdapat kebijakan daerah yang mengatur secara strategis dan teknis tentang Keamanan Informasi & Persandian
4. Minimnya Tata Kelola Keamanan Informasi	4. Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi





Mengidentifikasi CSF (Critical Succes Factor)

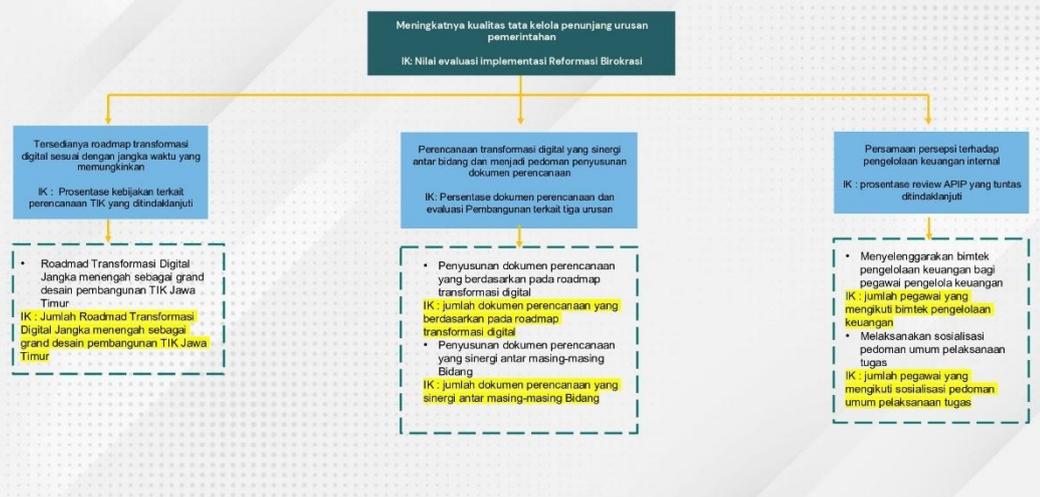


5. Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang urusan pemerintahan.

Faktor Penyebab	Kondisi yang Diperlukan
1. Belum tersedianya roadmap transformasi digital jangka menengah karena sulit melakukan forecasting terhadap perkembangan teknologi yang cepat	1. Tersedianya roadmap transformasi digital sesuai dengan jangka waktu yang memungkinkan
2. Kurangnya manajemen keuangan internal	2. Perencanaan transformasi digital yang sinergi antar bidang dan menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan
3. Terbatasnya kegiatan pengembangan SDM yang memfasilitasi pegawai	3. Persamaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan internal
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja	4. Terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM yang meningkatkan softskill pegawai
5. Kurangnya manajemen arsip yang baik	5. Tersedianya kesempatan peningkatan SDM secara formal bagi pegawai
	6. Meningkatnya jumlah asset yang mendukung kinerja
	7. Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan



INDIKATOR POHON KINERJA





INDIKATOR POHON KINERJA

